



PERAN GURU PPKN DALAM MEMBENTUK LITERASI POLITIK SISWA DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 HALMAHERA UTARA

Nur Aslamiyanti Safi¹, Wahyudin Noe², Jainudin Abdullah³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Khairun

E-mail: wahyudinnoe@unkhair.ac.id

Abstrak

Pendidikan politik adalah elemen krusial dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik siswa dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan sangat strategis dalam memberikan pendidikan politik guna membentuk literasi politik (*political literacy*) siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Halmahera Utara, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Guru PPKn di MAN 1 Halmahera Utara berhasil membentuk literasi politik siswa melalui edukasi politik tentang pemilihan umum (Pemilu), hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, peran lembaga negara, serta integritas politik; dan (2) faktor pendukung guru dalam membentuk literasi politik siswa MAN 1 Halmahera Utara yaitu kurikulum dan kompetensi guru PPKn, lingkungan sekolah yang mendukung literasi politik, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya karena keterbatasan sumber belajar serta rendahnya minat dan partisipasi siswa terhadap isu politik. Harapannya pembentukan literasi politik di sekolah terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi guru sehingga menarik belajar siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Kata Kunci: Guru PPKn, literasi politik, Siswa, MAN 1 Halmahera Utara

PENDAHULUAN

Pendidikan politik adalah elemen krusial untuk membangun kesadaran dan partisipasi siswa dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendidikan untuk pengembangan karakter, keterampilan, serta pengetahuan siswa, khusus literasi politik (*political literacy*) yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab

berlandaskan Pancasila. Literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memungkinkan warga negara untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban mereka, serta mampu mengambil keputusan politik secara rasional (Milner, 2002).

Namun di sisi lain, partisipasi pemilih pemula yang umumnya adalah siswa kelas XII membutuhkan dorongan kuat dari aspek pengetahuan dan keterampilan politik. Masalah yang kerap ditemui para pemilih pemula menjelang pemilihan umum (pemilu) antara lain partisipasinya hanya dipandang sebagai pelengkap, tidak memiliki posisi tawar, bahkan suaranya dieksploitasi oleh para politisi. Mereka digambarkan sebagai pemilih yang labil, menentukan pilihan berdasarkan tampilan luar atau popularitas, memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah sehingga datang ke TPS hanya sekedar menggugurkan hak pilihnya (Hariyanti dan Permady, 2023). Dapat dikatakan jika pemilu baru mencetak pemilih pemula secara kuantitas, belum secara kualitas yakni pemilih pemula yang cerdas, aktif, serta kritis sebagai penentu pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Pemilih pemula memerlukan bekal pengetahuan politik yang lebih luas dan mendalam melalui pembelajaran PPKn sebagai sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi topik yang relevan dan menarik untuk dikaji (Rahmayanti, 2023). Pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn mengajarkan cara menghargai perbedaan, memahami nilai-nilai demokrasi, proses pengambilan keputusan, serta berkontribusi kepada masyarakat. Dalam membelajarkan pendidikan politik seyogyanya tidak hanya menitikberatkan pada teori semata, tetapi juga praktik politik yang terjadi di kehidupan masyarakat. PPKn berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk siswa yang peka dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat.

Guru PPKn berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam membentuk karakter politik siswa agar memahami dan menyadari pentingnya keterlibatan dan partisipasi dalam kegiatan politik. Guru PPKn dapat berperan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya, berkontribusi secara aktif dan bertanggung jawab (Aji. dkk., 2022). Dengan kata lain pendidikan politik yang dibelajarkan, tidak saja berfokus pada aspek kognitif semata, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik sebagaimana tujuan pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tentunya tantangan tidaklah sedikit yang dihadapi oleh guru PPKn dalam membelajarkan pendidikan politik. Guru PPKn memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam membelajarkan materi politik, serta dukungan fasilitas dan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Halmahera Utara, di mana guru PPKn selain membelajarkan materi politik, juga terlibat dalam kegiatan praktik politik, seperti debat, simulasi pemilu, dan diskusi tentang isu-isu terkini dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dalam mengembangkan pemikiran kritis dan analitis terhadap berbagai isu politik. Namun kondisi tersebut terkendala dengan fasilitas dan sumber belajar yang masih terbatas sehingga berpengaruh pada kualitas pembelajaran politik. Dengan demikian peneliti memandang pentingnya penelitian ini dilakukan dengan judul *“Peran Guru*

PPKn dalam Membentuk Literasi Politik Siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Utara”. Hasil penelitian menjadi masukan bagi para *stakeholder* di bidang pendidikan seperti pimpinan sekolah, guru PPKn, akademisi, serta siswa agar pendidikan politik di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius demi membangun kehidupan siswa dan sekolah yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di MAN 1 Halmahera Utara yang terletak di Jalan Gamar Malamo telah terlaksana pada bulan April 2025 s/d Mei 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif di mana data penelitian digambarkan sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dan disajikan dalam bentuk rangkaian kata-kata. Adapun subjek penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, Guru PPKn, Siswa, serta Wakasek Kurikulum yang dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2018). Teknik observasi maksudnya cara untuk mengamati secara langsung semua kejadian di lokasi penelitian. Teknik wawancara merupakan cara berkomunikasi dengan informan dengan metode tanya jawab. Sedangkan studi dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa berupa tulisan, gambar, atau video guna menguatkan data penelitian. Setelah data terkumpul, lalu peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan tertulis di lapangan hingga tersusun menjadi laporan akhir yang lengkap. Kemudian penyajian data berupa informasi yang telah disusun secara menarik sehingga memudahkan peneliti untuk penarikan kesimpulan. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Siswa harus memiliki literasi politik (melek politik) dalam memahami setiap isu ataupun tema politik. Sebab kualitas demokrasi sangat ditentukan sejauhmana para pemilih pemula berpartisipasi dalam kegiatan politik disertai bekal pengetahuan, kesadaran, serta tanggung jawab yang baik. Oleh karena itu, guru PPKn dapat membentuk literasi politik siswa melalui suatu proses pembelajaran di kelas melalui beberapa cara seperti ceramah politik, debat, simulasi pemilihan umum, serta diskusi terkait isu-isu politik terkini baik di tingkat nasional maupun daerah. Cara demikian dapat membangun pemikiran kritis dan pemecahan masalah siswa terhadap isu-isu politik tersebut. Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara

Negara demokrasi yang baik terlihat dari sejauhmana literasi politik warga negara tersebut. Literasi politik didasarkan karena kesadaran yang tinggi dari setiap warga negara. Literasi politik diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan

berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Menurut Milner (2002), literasi politik adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memungkinkan warga negara untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban mereka, serta mampu mengambil keputusan politik secara rasional. Literasi politik mencakup kemampuan dalam mengkaji isu-isu politik yang mencakup pemilu, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, peran lembaga negara, integritas politik, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Dalam lingkungan pendidikan formal, pembentukan literasi politik siswa dilakukan oleh guru melalui pembelajaran PPKn. Siswa sebagai generasi muda yang berstatus sebagai pemilih pemula tidak jarang memiliki kesadaran yang rendah dalam berpolitik karena disebabkan oleh pemahaman dan pengalaman yang belum cukup baik. Oleh karena itu, peran guru PPKn menjadi penting adanya dalam membentuk literasi politik siswa dimana guru memberi ruang kepada siswa untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat, berpikir kritis, berani, terbuka dan percaya diri, saling menghargai pendapat atau keberagaman, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Ramadani, dkk., 2022).

Terkait dengan penelitian ini guru PPKn di MAN 1 Halmahera Utara telah berhasil membentuk literasi politik siswa di mana hal tersebut terlihat antara lain dari meningkatnya penguatan literasi politik siswa. Penguatan literasi politik melalui proses pendidikan dilakukan dengan berbantuan media audio visual seperti video di media sosial (*Youtube*) di mana guru menayangkan kegiatan politik warga negara yang berkembang di media sosial dan mengajak siswa untuk menganalisis berbagai informasi politik secara kritis dimana memilah dan memilih informasi yang benar serta mengambil keputusan politik yang tepat. Mengingat bahwa tidak semua informasi politik yang diterima adalah benar, bahkan ada informasi yang mengandung unsur *hoax* ataupun palsu. Oleh karena itu guru PPKn harus berupaya membimbing siswa tentang cara dan langkah-langkah memilih informasi politik yang benar sehingga siswa dapat menghindarkan diri dari informasi palsu tersebut, sebagaimana pernyataan Anshori, dkk. (2023) bahwa membangun kesadaran masyarakat, terutama pemilih pemula, melalui literasi politik dapat membantu menekan penyebaran informasi palsu.

Guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa tidak hanya mengajarkan tentang teori demokrasi dan sistem politik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru PPKn sebagai penyampai materi, fasilitator, motivator, serta teladan (*role model*) dalam menanamkan kesadaran kritis siswa sehingga mampu memilah informasi, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, menerapkan nilai-nilai politik yang beretika, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam istilah Mulyani (2022) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang baik, demokratis, berkarakter, dan mewujudkan cita-cita demokrasi”.

Peran guru PPKn dalam proses pendidikan, tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan politik, tetapi juga pembentukan sikap politik yang kritis dan demokratis siswa. Guru PPKn berperan dalam mengembangkan kemampuan berfikir kritis, menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme dan demokrasi, serta kesadaran politik siswa sehingga menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, serta berintegritas dalam proses demokrasi, termasuk memotivasi siswa ikut dalam berbagai sosial, organisasi sekolah, dan diskusi kebangsaan, yang melibatkan proses berpikir, berdialog, dan bertindak secara politik (Prayugo & Prayitno,

2022). Guru terus mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sehingga menjadi terbiasa dan akhirnya akan muncul minat terhadap politik. Oleh karena itu pendekatan guru PPKn sangat memengaruhi tingkat partisipasi siswa. Dengan demikian siswa akan terbentuk menjadi warga negara yang siap berperan dalam sistem demokrasi secara sehat dan bertanggung jawab.

2. Faktor pendukung dan penghambat guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara

Pembentukan literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung tersebut, antara lain:

a. Kurikulum dan Kompetensi guru PPKn

Kurikulum politik di MAN 1 Halmahera Utara dibelajarkan melalui pembelajaran PPKn yang mencakup materi tentang pemilu, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, peran lembaga negara, proses pengambilan keputusan, serta integritas politik. Berbagai materi tersebut bertujuan membantu siswa dalam memahami politik lebih mendalam dan mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Kurikulum politik di sekolah tersebut dijalankan oleh guru PPKn dengan kompetensi yang baik. Hal tersebut terlihat dari pengetahuan yang dimiliki guru relatif luas terkait materi sistem politik, demokrasi, dan isu-isu kebangsaan sehingga mampu menjelaskan secara menarik dan relevan. Kompetensi guru menjadi kunci dalam menumbuhkan minat serta pemahaman politik siswa. Guru PPKn berperan dalam membentuk karakter, moral, serta kesadaran berbangsa dan bernegara siswa. Kualitas guru tercermin dari sejauh mana mempunyai kemampuan profesional, pedagogik, berintegritas, dan kepribadian yang baik untuk mendukung proses pembelajaran.

Kompetensi pedagogik guru terlihat dari metode pembelajaran yang kreatif sehingga menarik minat belajar siswa, seperti simulasi pemilu atau diskusi interaktif. Metode tersebut dapat menstimulus siswa untuk belajar tentang isu-isu politik, hak dan kewajiban warga negara, serta kebebasan berpendapat dengan penuh tanggung jawab. Antusiasme yang tinggi dari sebagian siswa mencerminkan minat dan usaha untuk paham dan sadar akan politik.

b. Lingkungan sekolah yang mendukung literasi politik

Lingkungan sekolah yang mendukung literasi politik siswa seperti lingkungan MAN 1 Halmahera Utara yang demokratis dengan menciptakan suasana belajar yang terbuka dan partisipatif. Baik guru dan siswa diberikan ruang untuk berpendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui kegiatan dialog/musyawarah dan debat politik di kelas, simulasi Pemilu ketua OSIS/ketua kelas, serta terlaksananya berbagai agenda OSIS. Berbagai kegiatan itu menjadi wadah bagi siswa untuk mempraktikkan literasi politik dan memahami praktik demokrasi secara langsung di lingkungan sekolah.

Selain itu, dukungan dari berbagai pihak eksternal juga menjadi faktor penting dalam membentuk literasi politik siswa. Misalnya keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dalam melakukan sosialisasi di sekolah dapat memperkuat pemahaman siswa mengenai prosedur pemilu dan pentingnya partisipasi politik. Kegiatan lain seperti seminar, diskusi publik, maupun simulasi pemungutan suara yang diadakan oleh lembaga terkait mampu memberikan pengalaman nyata kepada siswa tentang proses demokrasi.

Dengan adanya sinergi antara sekolah, guru PPKn, dan lembaga pemerintah, siswa tidak hanya memperoleh teori dari kelas, tetapi juga merasakan langsung praktik berdemokrasi, sehingga literasi politik mereka semakin matang dan siap diaplikasikan dalam kehidupan nyata (Hidayat, 2019).

Kemudian peran Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) maupun ekstrakurikuler juga menjadi pendukung penting dalam membentuk literasi politik siswa. Melalui kegiatan organisasi, siswa belajar mengenai kepemimpinan, demokrasi, musyawarah, serta pengambilan keputusan bersama. Pengalaman ini melatih mereka untuk memahami proses politik dalam lingkup kecil yang nantinya dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas di masyarakat. Dengan adanya wadah tersebut, siswa tidak hanya memperoleh teori dari guru PPKn, tetapi juga mengalami langsung praktik nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

c. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran

Penggunaan media sosial, berita digital, dan video edukatif oleh guru PPKn dapat membantu siswa memahami isu-isu politik aktual dengan cara yang menarik dan kontekstual. Akses informasi yang luas melalui internet, media sosial (*YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter*, dsb.), maupun *platform* pendidikan daring memberikan peluang besar bagi siswa untuk mengenal isu-isu politik secara lebih cepat dan aktual. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran yang interaktif, misalnya melalui video edukasi, artikel berita, *podcast* politik, hingga simulasi pemilu berbasis aplikasi. Dengan bimbingan guru PPKn, siswa dapat belajar memilah informasi yang kredibel sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu politik yang berkembang di masyarakat (Nuryani, 2020).

Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran dapat mendorong siswa berfikir kritis terhadap informasi politik yang beredar di masyarakat, serta membantu siswa memahami isu-isu sosial dan politik yang kompleks, di mana guru dapat mengaitkan materinya dengan peristiwa aktual di lingkungan masyarakat. Menurut Katarudin dan Putri (2020) bahwa literasi politik memengaruhi partisipasi politik, terutama melalui komunikasi teknologi informasi seperti media cetak dan elektronik. Guru membimbing siswa untuk kritis dalam menyikapi informasi politik dan mengarahkan agar siswa tidak mudah terpengaruh oleh berita *hoax* atau ujaran kebencian di media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam membentuk literasi politik siswa sangat beragam, baik yang berasal dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Di lingkungan internal, dukungan kurikulum, kompetensi guru PPKn, lingkungan sekolah yang mendukung literasi politik, serta peran organisasi siswa menjadi pilar penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Sedangkan dari luar sekolah, hadirnya teknologi, media, serta program sosialisasi dari KPU dan organisasi masyarakat semakin memperkuat wawasan politik siswa. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa upaya membentuk literasi politik tidak hanya menjadi tanggung jawab guru semata, tetapi merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan faktor penghambat guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara karena:

a. Keterbatasan sumber belajar

Guru PPKn sering menghadapi keterbatasan sumber belajar yang relevan dengan perkembangan isu politik terkini. Buku teks pelajaran PPKn sering kali hanya berisi materi normatif, sementara isu-isu politik aktual tidak banyak diulas secara mendalam. Kondisi ini membuat siswa kurang mendapatkan gambaran nyata tentang situasi politik yang sedang berlangsung dan menyebabkan pembelajaran politik menjadi kurang kontekstual dan menarik bagi siswa. Di sisi lain, akses siswa terhadap informasi politik dari media sosial sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik, sehingga mereka berpotensi terpapar informasi keliru atau *hoax*. Hal ini menjadi tantangan bagi guru PPKn dalam memastikan siswa memperoleh pemahaman politik yang benar, objektif, dan kritis.

b. Rendahnya minat dan partisipasi siswa terhadap isu politik

Minat siswa yang beragam sehingga tidak semua siswa MAN 1 Halmahera Utara tertarik pada topik politik. Sebagian siswa MAN 1 Halmahera Utara menganggap politik merupakan kajian yang rumit dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Kompleksitas materi politik pada topik seperti sistem pemerintahan, pemilu, dan hak asasi seringkali kali menggunakan istilah yang sulit dipahami oleh siswa MAN 1 Halmahera Utara. Sikap apatis dan kurangnya kesadaran politik tersebut membuat upaya guru dalam menumbuhkan literasi politik menjadi tidak optimal. Adapun pengaruh media sosial dan lingkungan terhadap siswa antara lain lebih banyak terpapar konten hiburan daripada berita politik yang mendidik. Selain itu, lingkungan keluarga atau masyarakat yang kurang peduli terhadap isu-isu politik juga berpengaruh terhadap rendahnya minat siswa untuk mengikuti perkembangan politik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam membentuk literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi minimnya sumber belajar yang relevan, rendahnya minat sebagian siswa terhadap isu politik, dan kompleksitas materi yang dianggap sulit dipahami. Sementara hambatan eksternal antara lain pengaruh media sosial yang tidak selalu memberikan informasi valid dan lebih banyak konten hiburan daripada berita politik yang mendidik. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi agar tujuan pendidikan politik melalui PPKn dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Pembentukan literasi politik siswa/i di MAN 1 Halmahera Utara sangat penting dilakukan oleh guru PPKn. Proses pembelajaran PPKn seperti ceramah materi politik, diskusi politik, simulasi pemilu, serta debat kebijakan publik dapat mengembangkan kemampuan berfikir kritis, menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme dan demokrasi, serta kesadaran politik siswa sebagai modal menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, serta berintegritas dalam proses demokrasi.

Adapun hasil penelitian peran guru PPKn dalam membentuk literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara, yaitu (1.) Guru PPKn di MAN 1 Halmahera Utara berhasil membentuk literasi politik siswa melalui edukasi politik tentang pemilu, hak dan kewajiban

warga negara dalam bidang politik, nilai-nilai demokrasi, serta integritas politik. Proses edukasi dilaksanakan dengan bantuan media audio visual seperti media sosial (*Youtube*) di mana guru menayangkan kegiatan politik warga negara yang berkembang di media sosial dan mengajak siswa untuk menganalisis kegiatan tersebut; dan (2.) Faktor pendukung guru dalam membentuk literasi politik siswa di MAN 1 Halmahera Utara yaitu kurikulum dan kompetensi guru PPKn, lingkungan sekolah yang mendukung literasi politik, serta pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. Adapun faktor penghambatnya karena keterbatasan sumber belajar serta rendahnya minat dan partisipasi siswa terhadap isu politik. Harapannya pendidikan politik di lingkungan sekolah terus ditingkatkan kualitasnya oleh guru PPKn sehingga menarik belajar siswa sebagai bekal berpartisipasi dalam kegiatan politik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, D. S., Yusuf, Y., & Sugiaryo, S. (2022). Peran guru PPKn dalam menumbuhkembangkan nilai karakter demokratis pada peserta didik kelas IX di SMP Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 29-36.
- Anshori, A., Rudianto, R., & Izharsyah, J. R. (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 177-184.
- Hariyanti dan Permady, G. C. (2023). Pendidikan Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran PPKn di Persekolahan. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 10(2), 160-168.
- Hidayat, R. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter dan Literasi Politik Peserta Didik. *Jurnal Civic Education*, 7(2), 115–124.
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilukada kota pariaman tahun 2018. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70-79.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Universitas Indonesia Press.
- Milner, H. (2002). *Civic Literacy (How Informed Citizens Make Democracy Work)*. University Press of New England. United States of America.
- Mulyani, S. D. (2022). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(2), 104-113.
- Nuryani, S. (2020). Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 45–53.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 427-442.
- Rahmayanti, E. (2023). Peran Guru Dalam Menerapkan Pembelajaran Ppkn Sebagai Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(Special-1), 414-422.
- Ramadani, W. O. D., Noe, W., & Rajaloe, N. (2022). Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas VIII SMP Negeri 4 Kota Ternate. *Jambura Journal Civic Education*, 2(1), 90-101.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).